

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses collaborative governance berlangsung dalam pengelolaan ruang belajar pendidikan nonformal berbasis komunitas di Kawasan Kenjeran Surabaya, dengan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran yang dikelola Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat dimensi collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal yang kondusif dan kepemimpinan fasilitatif yang kuat telah mendorong terbentuknya proses kolaboratif yang berjalan cukup baik dan mampu menghasilkan capaian nyata bagi anak-anak dampingan serta masyarakat sekitar, meskipun desain kelembagaan yang mengatur kolaborasi tersebut masih belum terformalisasi secara memadai dan keterlibatan aktor eksternal, khususnya pemerintah, masih sangat terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai collaborative governance dalam pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran Surabaya, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antaraktor telah berlangsung melalui beberapa unsur sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan empat indikator utama, yaitu starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan

ruang belajar berbasis komunitas di Kawasan Kenjeran Surabaya.

1. Starting Conditions (Kondisi Awal)

Kondisi awal kolaborasi dalam pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran menunjukkan adanya kesamaan kepentingan antara Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya, masyarakat, dan pihak terkait dalam meningkatkan akses pendidikan nonformal bagi anak-anak di kawasan Kenjeran. Kepercayaan yang telah terbangun sejak awal serta dukungan masyarakat menjadi modal penting dalam membentuk kolaborasi, meskipun keterlibatan pemerintah masih belum optimal.

2. Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan dalam kolaborasi belum sepenuhnya berjalan secara formal. Pembagian peran antaraktor telah dipahami dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum didukung oleh aturan tertulis, mekanisme koordinasi yang baku, maupun bentuk kerja sama resmi dengan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan keberlangsungan program masih bergantung pada kesepahaman dan komitmen para relawan.

3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh koordinator komunitas mampu membangun komunikasi, menjaga hubungan antaraktor, serta mendorong partisipasi relawan dan masyarakat. Peran pemimpin sebagai fasilitator terbukti mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dan menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran secara konsisten.

4. Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Proses kolaboratif telah berjalan melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta pemahaman terhadap tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Kolaborasi tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Namun demikian, keberlanjutan proses kolaboratif masih memerlukan penguatan kemitraan dengan pemerintah serta pengembangan sistem koordinasi yang lebih terstruktur.

Berdasarkan keempat indikator Ansell dan Gash, pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran telah berjalan cukup baik. Keberhasilan kolaborasi didukung oleh kondisi awal yang kondusif, kepemimpinan fasilitatif yang efektif, dan proses kolaboratif yang berlangsung secara berkelanjutan. Namun, aspek desain kelembagaan masih menjadi kelemahan utama karena belum adanya aturan dan mekanisme formal yang mengikat seluruh aktor. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pemerintah menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberlanjutan kolaborasi di masa mendatang.

Kondisi ini menjadikan keberlangsungan program sangat bergantung pada motivasi personal relawan sehingga rentan terhadap gangguan apabila terjadi pergantian aktor kunci tanpa mekanisme kaderisasi yang jelas. Dengan demikian, collaborative governance di Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran dapat dinilai telah berjalan secara substantif dan membawa manfaat yang berarti, namun penguatan pada aspek formalisasi

kelembagaan serta perluasan kemitraan dengan pihak eksternal menjadi kunci penting yang perlu diperhatikan agar kolaborasi ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1. Bagi Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya

Komunitas disarankan untuk mulai menyusun aturan main dan mekanisme koordinasi secara tertulis serta membangun sistem kaderisasi dan transfer pengetahuan antarrelawan, agar keberlangsungan program tidak lagi bergantung sepenuhnya pada individu tertentu dan pengalaman yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat terus diwariskan kepada generasi relawan berikutnya.

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan

Pemerintah disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih sistematis kepada komunitas relawan pendidikan nonformal, misalnya melalui pengakuan kelembagaan, pelatihan, atau fasilitasi jaringan antarkomunitas, tanpa harus mengambil alih atau mengurangi sifat sukarela dan otonomi yang selama ini menjadi kekuatan komunitas tersebut.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua Peserta Didik

Masyarakat dan orang tua diharapkan dapat terus memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ruang belajar,

karena kepercayaan dan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu modal sosial utama yang menopang keberlangsungan pendidikan nonformal berbasis komunitas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada komunitas relawan pendidikan lain dengan karakteristik yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan collaborative governance dalam berbagai konteks pendidikan nonformal berbasis komunitas di Indonesia.